

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu pembangunan dikatakan optimal ketika potensi yang dimiliki wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan, dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya penunjang seperti modal dan teknologi informasi. Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Desa yang merupakan bagian dari daerah memiliki kontribusi besar untuk kemajuan suatu daerah.

Desa dalam hal ini memiliki kontribusi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan partisipasi dari Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dengan menggali potensi desa yang dimiliki dengan tujuan pengembangan dan kemajuan desa, masyarakat akan optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Di beberapa daerah, salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata. Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah. Dalam buku yang berjudul *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata* (Sedarmayanti, 2014) mengungkapkan bahwa kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Komponen pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan antara lain pemerintah, dunia usaha atau industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pers, LSM, dan akademisi).

Akhir-akhir ini pariwisata menjadi salah satu sektor yang gencar untuk ditingkatkan di Indonesia. Sebab melalui segala kegiatan pengembangan dari sektor pariwisata pada akhirnya dapat menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya terlebih pada sektor ekonomi. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu mendatangkan devisa bagi negara melalui kedatangan para wisatawan setelah sektor pertambangan minyak bumi serta gas alam, apabila dikembangkan secara berkelanjutan maka dapat membantu dalam hal peningkatan devisa negara itu sendiri yang mana hal tersebut akan membawa dampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara sehingga dapat membantu proses pembangunan nasional ataupun daerah. Oleh karena itu, seiring dengan perjalanan waktu timbullah berbagai macam tren yang berhubungan dengan pengembangan sektor kepariwisataan itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya dapat dilihat berkembangnya tren yang berkaitan dengan pembangunan desa wisata.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tren dikarenakan banyaknya desa-desa yang ada di Indonesia ini menginginkan desanya untuk dapat ditetapkan menjadi sebuah desa wisata. Kesadaran akan perubahan tren kepariwisataan yang dulunya lebih pada pariwisata massal dengan pola dimana jumlah wisatawan yang mendatangi suatu destinasi wisata yang telah populer secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar, kemudian beralih ke pariwisata alternatif dengan lebih mengedepankan destinasi yang kurang dikunjungi secara tradisional, dengan fokus pada kelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat setempat yang mencakup berbagai jenis pengalaman, termasuk ekowisata, tur budaya, petualangan alam, *homestay* di komunitas lokal, dan berbagai bentuk pariwisata berkelanjutan lainnya. Semua hal tersebut kemudian membuat banyaknya desa memanfaatkan peluang yang ada untuk membentuk sebuah desa wisata di wilayahnya.

Adapun hal yang membedakan tren pariwisata alternatif ini dengan pariwisata minat khusus, serta pariwisata berbasis komunitas ialah fokus kegiatan pariwisata alternatif lebih menekankan pada kelestarian lingkungan, keunikan budaya, serta interaksi yang mendalam dengan destinasi wisata contohnya ekowisata, tur budaya, serta petualangan alam. Sedangkan pariwisata minat khusus berfokus pada kegiatan atau minat dari wisatawannya itu sendiri seperti aktivitas pariwisata kuliner ataupun pariwisata sejarah dan terkait pariwisata berbasis komunitas akan lebih menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan dari industri pariwisata itu sendiri dengan tujuan memberdayakan komunitas lokal secara ekonomi, sosial budaya. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercatat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pembentukan desa wisata, yang mana bila melihat data pada tahun 2022 terdapat 3.419 desa wisata dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai 4.674 desa wisata yang tercatat.



Gambar 1. 1 Jumlah desa wisata menurut provinsi 2024

Sumber: Laman jadesta kemenparekraf.go.id

Pascapandemi Covid-19, tren desa wisata semakin populer mengikuti tren wisata yang cenderung menjadi *personalize, customize, localize, dan smaller in size*. Kondisi ini membuat jumlah desa wisata terus berkembang setiap tahun. Merujuk data dari laman Jadesta (Jaringan Desa Wisata) Kemenparekraf, per 13 April 2024 terdapat 5.487 desa wisata yang tersebar di semua provinsi di Indonesia dengan berbagai klasifikasi, mulai dari desa wisata rintisan hingga desa wisata mandiri.

Desa wisata merupakan suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitikberatkan pada kontribusi masyarakat sekitar perdesaan dan pelestarian lingkungan area perdesaan. Desa wisata dalam konteks wisata perdesaan adalah aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi perdesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010, desa wisata merupakan bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana, dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku.

Membahas terkait keberadaan desa wisata itu sendiri maka tidak akan terlepas dari pengaturan dasar terkait pemerintahan daerah yang tertuang dalam BAB VI Pasal 18A UUD 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya tidak dapat diperlakukan secara sama. Oleh karena itu, diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah secara umum serta dibutuhkan pula berbagai undang-undang lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah. Terkait dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan urusan pemerintahan sendiri dapat mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa berhubungan dengan desa wisata sendiri masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren pilihan sebab desa wisata merupakan bagian dari urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempertahankan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut dengan mempergunakan otonominya sendiri. DESA WISATA 2022 PERDA NO. 2, LD 2022/NO. 2. TLD 2022/NO. 257, 15 HLM. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG DESA WISATA menyebutkan Salah satu peran penting pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah dengan melakukan upaya upaya pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan upaya memajukan kepariwisataan daerah melaui desa wisata,

dengan tetap memelihara kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai desa wisata agar potensi desa wisata yang ada dapat lebih berkembang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No 4 Tahun 2012, kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam dapat dilakukan di taman nasional dengan memperhatikan asas kelestarian. Pengelolaan pariwisata alam di Taman Nasional dapat dilakukan di zona pemanfaatan. Hal yang harus dilakukan dalam kegiatan pengelolaan pariwisata alam terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara. Jasa Boga dan Restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara. Atraksi Wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung. Cinderamata (Souvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal. Biro Perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali. (Kinanggi, 2024)

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebagai pelaku pengembangan pariwisata adalah dengan munculnya kelompok sadar wisata atau yang biasa dikenal dengan pokdarwis. Pokdarwis merupakan salah satu komponen penting yang berasal dari masyarakat setempat yang memiliki kontribusi dan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan potensi kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan pokdarwis memiliki peran aktif sebagai penggerak dalam meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat lain dalam pengembangan pariwisata (Nurfahima & Hijjang, 2022).

Desa wisata merupakan suatu komunitas yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang berinteraksi secara langsung, mempunyai minat dan kesadaran, serta saling berperan sesuai dengan kemampuan, ketrampilan, dan kemampuannya, serta meningkatkan potensi diri dan masyarakat. Mewujudkan jalan tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata serta terwujudnya Pesona Saputa untuk pengembangan lebih lanjut daerah melalui pariwisata dan manfaatnya bagi masyarakat setempat (Damayanti et al., 2022). Desa wisata merupakan kelompok masyarakat dan swadaya yang dalam kegiatan sosialnya berupaya meningkatkan pemahaman tentang pariwisata, dengan memperhatikan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut, untuk meningkatkan nilai pariwisata dan menyediakan sarana untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, turut serta mensukseskan pembangunan pariwisata (Andhita et al., 2020).

Desa wisata pada umumnya merupakan kawasan pedesaan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang layak dijadikan tujuan wisata. Di wilayah ini masyarakatnya masih mempunyai tradisi dan budaya aslinya. Selain itu, berbagai elemen pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial juga menghiasi kawasan

desa wisata. Selain faktor-faktor di atas, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi faktor penting dalam desa wisata (Lenny et al., 2023).

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Karakteristik utama pada desa wisata merupakan penduduk di kawasan desa wisata masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut menjadi ciri khas dari sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata (Zakaria & Suprihardjo, 2014). Dalam keberhasilan pengembangan desa wisata, pokdarwis merupakan elemen penting yang menjadi pengelola pariwisata serta pencetus ide kreatif dan inovasi dalam hal pengembangan desa wisata sehingga sektor wisata dapat berkembang. Oleh karena itu jika tidak memiliki skill kreativitas dan inovasi maka sektor pariwisata berpotensi tidak berkembang (Riannada & Madliyah, 2021).

Desa Wisata Tajurhalang pernah mengalami masa stagnasi pada tahun 2021, di mana aktivitas pariwisata dan program pengembangannya kurang optimal akibat berbagai faktor, termasuk dampak pandemi serta minimnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kondisi tersebut membuat potensi wisata yang dimiliki desa ini, seperti keindahan alam, tradisi lokal, dan sumber daya agraris, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, pada tahun 2024, Desa Wisata Tajurhalang kembali aktif dengan berbagai inisiatif pengembangan, termasuk revitalisasi infrastruktur wisata, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan penguatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan mitra eksternal. Kebangkitan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali Desa Wisata Tajurhalang sebagai destinasi unggulan, sekaligus membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Konsep Triple Helix yang diperkenalkan oleh Etzkowitz (1993) serta Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) pada dekade 1990-an, mengambil inspirasi dari pemikiran para pendahulunya seperti Lowe (1982) dan Sábato serta Mackenzi (1982). Konsep ini menggambarkan pergeseran dari hubungan dua pihak antara industri dan pemerintah yang menjadi ciri masyarakat industri, menuju interaksi tiga pihak yang melibatkan universitas, industri, dan pemerintah dalam konteks masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*). Triple Helix beranggapan bahwa inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat pengetahuan sangat bergantung pada peningkatan peran universitas, serta pada terbentuknya institusi dan struktur sosial baru yang merupakan hasil dari perpaduan elemen-elemen dari ketiga sektor tersebut. Mengacu pada pandangan Schumpeter (1942), konsep ini tidak hanya menyoroti proses "penghancuran kreatif" yang merupakan ciri alami dari inovasi, tetapi juga "pembaruan kreatif" yang terjadi di dalam masing-masing institusi universitas, industri, dan pemerintah maupun pada titik temu di antara ketiganya. (Jaelani, 2019)

Penelitian lain oleh Yuzhuo Cai (2014) menyoroti adanya kecenderungan serupa di berbagai negara, meskipun berasal dari konteks awal yang berbeda, dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi dan sosial berbasis pengetahuan. Esensi dari gagasan Triple Helix terletak pada penguatan peran pengetahuan dan kontribusi universitas dalam sistem ekonomi. Saat ini, universitas tengah mengalami perubahan mendasar dalam dua aspek: pertama, meluaskan cakupan misinya untuk tidak hanya mencakup pendidikan, pelestarian budaya, dan penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial; kedua, adanya pergeseran fokus dari tingkat individu ke tingkat organisasi dalam menjalankan setiap misi tersebut. Triple Helix mengacu pada kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah yang dipandang sebagai strategi untuk mengatasi kekurangan modal sosial dan kesenjangan teknologi. Meski terdapat keyakinan luas di kalangan pembuat kebijakan dan akademisi global bahwa model Triple Helix menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, penting untuk dicatat bahwa konsep ini lahir dari pengalaman negara-negara maju di Barat. (Jaelani, 2019)

Etzkowitz dan Leydesdorff (1998, 2000), bersama dengan Leydesdorff dan Meyer (2006), mengembangkan model Triple Helix yang bertumpu pada anggapan bahwa hubungan antara industri, universitas, dan pemerintah semakin bersifat saling bergantung. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga entitas kelembagaan tersebut perlu dianalisis sebagai bagian dari proses evolusi bersama. Model ini berfungsi sebagai alat heuristik yang mendorong peneliti untuk mempertimbangkan secara sistematis ketiga sektor tersebut dalam mengkaji dinamika inovasi dan produksi pengetahuan. Menurut Etzkowitz dan Leydesdorff (1998), Triple Helix bukanlah sebuah konsep dengan makna deskriptif tunggal, melainkan merupakan kerangka kerja penelitian yang telah melahirkan berbagai interpretasi dan temuan deskriptif yang beragam. (Jaelani, 2019)

Etzkowitz (2003) menyoroti bahwa secara historis, universitas dipandang sebagai pendukung utama dalam proses inovasi, dengan peran utama menyediakan sumber daya manusia terampil, hasil riset, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Namun, dalam perkembangannya, universitas kini semakin aktif terlibat dalam penciptaan perusahaan baru, terutama yang berbasis pada teknologi inovatif hasil penelitian akademis. Rivette dan Kline (1999) mengemukakan bahwa revolusi akademik pertama ditandai dengan transformasi universitas dari lembaga yang hanya berfokus pada pengajaran menjadi institusi yang menggabungkan fungsi pengajaran dan penelitian. Meskipun terdapat ketegangan antara dua fungsi tersebut, kombinasi ini terbukti mampu menghasilkan sinergi yang kreatif dan produktif. Hal serupa juga diharapkan muncul dari integrasi antara pembangunan ekonomi dan sosial dengan kegiatan pendidikan dan riset, yang dikenal sebagai revolusi akademik kedua. Dalam konteks ini, modal intelektual menjadi sama krusialnya dengan modal finansial sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Salah satu indikasinya adalah ketidaksesuaian model tradisional dalam menilai perusahaan hanya berdasarkan aset fisik. Selain itu, berkembang pula budaya akademik kewirausahaan yang memadukan semangat penemuan ilmiah dengan penerapannya secara praktis. Dengan demikian,

universitas tidak lagi hanya berperan sebagai pendukung industri atau pemerintah, tetapi sebagai mitra sejajar dan aktor penting dalam kemitraan Triple Helix antara universitas, industri, dan pemerintah. (Jaelani, 2019)

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya (Wijaya & Zulkarnain, 2016). Kelompok sadar wisata (pokdarwis), salah satu alternatif pengembangan pariwisata terkait dengan kampanye sadar wisata. Pengembangan pariwisata nusantara yang dilakukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) melalui berbagai kegiatan antara lain pembinaan masyarakat melalui kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata. Pokdarwis merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang berasal dari masyarakat yang tentunya mengoptimalkan mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata. Setiap organisasi tentu akan menganut strategi yang berbeda dalam usaha mencapai tujuan.

Salah satu jenis konsep pemerintahan atau tata kelola adalah konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Tata kelola kolaboratif adalah suatu sistem di mana pelaku barang publik dan swasta secara kolektif berkolaborasi dalam berbagai cara dan menggunakan proses tertentu untuk menetapkan undang-undang dan peraturan untuk penyediaan barang publik. Konsep ini menekankan pentingnya pemerintah sebagai aktor publik dan swasta (perusahaan) bekerja sama melalui cara dan proses tertentu untuk menghasilkan produk, aturan, dan kebijakan hukum yang sesuai untuk publik atau masyarakat Ansell dan Grash (dalam Kurniadi & Suryadi, 2021). Selain itu, menjelaskan strategi pemerintah baru yang disebut pemerintahan kolaboratif. Suatu bentuk tata kelola di mana berbagai pemangku kepentingan secara bersamaan berpartisipasi dalam forum dengan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan kolektif.

Menurut Goldsmith dan Kettle (dalam Simanjuntak et al., 2023) mengemukakan bahwa ada kriteria penting yang dapat dijadikan kriteria keberhasilan jaringan dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Kriteria tersebut yakni struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar peserta, tata kelola, akses terhadap otoritas, akuntabilitas/tanggung jawab distributif, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya. Selain itu, Adhisakti (dalam Pantiyasa, 2018) berpendapat strategi pembangunan pariwisata pedesaan diharapkan menjadi model yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan pemerintah di sektor ini. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya menyediakan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, Menurut Pitana (dalam Pantiyasa, 2018) pembangunan dan penguatan pariwisata yang telah dilakukan hendaknya mampu berkelanjutan dan dipertahankan dimasa depan dan menyatakan dalam pariwisata berkelanjutan, penekanan keberlanjutan bahkan tidak cukup hanya berkelanjutan ekologis dan

berkelanjutan pembangunan ekonomi tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah berkelanjutan kebudayaan, karena kebudayaan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan. Implementasi dari konsep-konsep ini diaplikasikan dalam program pengembangan pariwisata pedesaan, sehingga pengembangan desa tersebut harus tetap mampu menjaga kelestarian lingkungan. Disamping strategi dan program yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, meningkatkan taraf hidupnya sehingga masyarakat akan berusaha mempertahankan keberlanjutan pariwisata tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis di Desa Tajurhalang dapat dianalisis melalui pendekatan 4P (*Product, Price, Place, Promotion*) dalam strategi pemasaran. *Product* (Produk) merujuk pada pengembangan berbagai atraksi wisata seperti agroeduwisata dan paket wisata berbasis budaya lokal yang menjadi daya tarik utama desa. Kolaborasi ini memastikan produk wisata dikembangkan dengan memperhatikan potensi lokal yang unik. *Price* (Harga) menjadi aspek penting dalam kolaborasi ini, di mana pemerintah desa dan Pokdarwis bersama-sama menentukan strategi harga yang sesuai dengan nilai produk dan daya beli wisatawan, sehingga menciptakan keseimbangan antara aksesibilitas dan keuntungan. *Place* (Tempat) fokus pada peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum di lokasi wisata, untuk memastikan pengalaman wisatawan yang nyaman dan menarik. *Promotion* (Promosi) ditekankan melalui pelatihan pemasaran digital, yang memungkinkan Pokdarwis memanfaatkan media sosial dan platform online untuk meningkatkan visibilitas Desa Tajurhalang sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen 4P, kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pariwisata desa secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis di Desa Tajurhalang dapat dilihat melalui lensa teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), yang menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan manusia dalam organisasi. Dalam konteks ini, pelatihan dan pengembangan menjadi kunci, di mana anggota Pokdarwis diberikan pelatihan manajemen wisata dan pemasaran digital untuk meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip MSDM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih produktif. Selain itu, kolaborasi ini juga mendorong keterlibatan aktif dan motivasi anggota Pokdarwis dalam proses pengambilan keputusan, yang penting untuk menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja secara berkala dilakukan untuk memastikan program wisata berjalan sesuai rencana dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Komunikasi yang efektif dan pengelolaan konflik yang baik antara pemerintah desa dan Pokdarwis menjadi elemen penting dalam menciptakan sinergi yang harmonis. Dengan pendekatan ini, kolaborasi di Desa Tajurhalang tidak hanya fokus pada pengembangan pariwisata, tetapi juga pada penguatan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Dalam Hayun, (2001) Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan. (Kinanggi, 2024)

Desa Tajurhalang di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, merupakan desa yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang menarik. Dengan wilayah luas yang didominasi oleh kawasan pertanian dan lahan hijau, desa ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan lingkungan yang asri. Terletak di daerah perbukitan, Tajurhalang memiliki ketinggian yang bervariasi, memberikan iklim yang sejuk dan udara yang bersih. Fisik wilayah ini menjadi keunggulan yang tidak hanya mendukung kegiatan agraris tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan ekowisata dan agrowisata, yang sangat menarik bagi wisatawan lokal.

Dari sisi demografi, mayoritas penduduk Desa Tajurhalang merupakan masyarakat asli Sunda yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadat setempat. Kehidupan sosial desa sangat harmonis, dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang kuat di kalangan warganya. Tradisi Sunda seperti “Sedekah Bumi” masih dipertahankan dan dirayakan dengan semarak sebagai ucapan syukur atas panen. Tradisi ini juga mempererat ikatan sosial antarwarga dan menyuburkan kehidupan budaya desa. Selain itu, kegiatan keagamaan juga rutin diadakan, mencerminkan kerukunan umat yang terjalin dengan baik di desa ini.

Dari segi infrastruktur, Desa Tajurhalang masih menghadapi beberapa tantangan. Meski jalan utama desa sudah beraspal, akses menuju beberapa lahan pertanian masih memerlukan perbaikan. Sarana transportasi yang terbatas menyebabkan keterbatasan mobilitas bagi masyarakat, terutama ketika membawa hasil panen ke pasar. Pemerintah desa terus berupaya melakukan perbaikan fasilitas umum, seperti jalan desa, irigasi, serta pembangunan posyandu dan sekolah untuk memenuhi kebutuhan warga. Bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

Selain itu, desa ini memiliki potensi besar di bidang ekowisata. Dengan kondisi alam yang indah, hutan-hutan hijau, serta sungai kecil yang jernih, Tajurhalang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam. Banyak wisatawan lokal dan asing yang tertarik untuk menjelajahi keindahan alam yang asri di sekitar Cijeruk dan sekitarnya. Untuk mendukung hal ini, pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pegiat pariwisata untuk membuka jalur-jalur wisata, seperti trekking dan berkemah.

Kehidupan masyarakat desa ini masih lekat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar kuat, seperti budaya gotong royong yang rutin dilakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Misalnya, ketika ada acara pernikahan atau acara adat lainnya, warga desa akan bergotong royong untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari mendirikan tenda, menyediakan makanan, hingga menjaga kebersihan lokasi

acara. Budaya ini menjadi ciri khas Desa Tajurhalang dan turut memperkuat rasa persaudaraan antar warga

Dari aspek lingkungan, Tajurhalang memiliki kawasan hutan dan lahan hijau yang cukup luas. Pengelolaan hutan dan kawasan hijau ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya erosi atau longsor, mengingat kontur wilayahnya yang berbukit. Program penghijauan dan reboisasi pun rutin dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan semakin meningkat dengan adanya program sosialisasi dari pemerintah

Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Tajurhalang memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor salah satunya yaitu pariwisata. Dukungan dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi desa ini. Dengan segala potensi yang ada, Desa Tajurhalang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang, sekaligus tetap mempertahankan kearifan lokal dan keindahan alam yang dimilikinya.



Gambar 1. 2 Diskusi dengan pemerintah desa

Melalui program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan (ppk ormawa) yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI). Program ini merupakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan (ormawa) dengan tujuan di antaranya adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, dan menginisiasi kemajuan wilayah desa atau kelurahan di Indonesia.

Hasil survei yang dilakukan oleh tim PPK Ormawa BEM FEB-Unpak mengenai potensi Desa Tajurhalang, yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yaitu Kang Habib bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Potensi Desa Tajurhalang

RW	Potensi
01	Tanaman hias, tanaman herbal, kerajinan tangan dari bambu
02	Bank sampah, budidaya lele, magot, Lembah Casa, titik nol <i>adventure</i> ,
03	<i>Home stay</i> , sapi perah, kesenian budaya, kerajinan tangan dari bambu, dan curug.
04	Kuliner UMKM
05	UMKM makanan tradisional
06	Perikanan

Berdasarkan Tabel 1.1, dari 6 Rukun Warga (RW) di Desa Tajurhalang, terdapat 4 RW dengan potensi dominan yang meliputi: camping ground, curug, pertanian ubi jalar dan singkong, tanaman herbal, budidaya maggot dan ikan lele, peternakan sapi, serta bank sampah. Dari potensi tersebut, 5 lokasi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan adalah bank sampah, budidaya maggot dan lele, tanaman herbal, curug, dan camping ground. Namun, masyarakat desa menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola potensi ini, antara lain: 1) bank sampah dan lahan kolam lele yang belum dikelola secara optimal. Bank sampah tidak hanya berkontribusi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan memberdayakan masyarakat, sementara budidaya maggot menjadi solusi untuk menyediakan pakan ternak berprotein tinggi (Rahman et al., 2024). 2) Pengelolaan tanaman herbal oleh masyarakat masih belum maksimal, terutama dalam pengembangan bibit dan pengolahannya menjadi produk turunan. Tanaman herbal memiliki banyak manfaat kesehatan dan dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh. 3) Pemasaran dan branding wisata di desa tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital. 4) Kesadaran masyarakat Desa Tajurhalang akan potensi besar wisata yang bisa dikembangkan masih rendah, dan komitmen dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mendukung pembangunan desa wisata juga masih kurang.

Pemberdayaan Desa Tajurhalang dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemandirian masyarakat secara menyeluruh. Konsep desa mandiri menitikberatkan pada peran aktif semua elemen masyarakat, sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah. Supriatno dan Rozi (2024) menjelaskan bahwa kolaborasi pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, dan Media (ABGKM) menjadi hal penting dalam menjalankan peran dan tanggung jawab pemberdayaan desa. Pemerintah desa berperan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang mencakup aspek infrastruktur, layanan sosial, serta ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga

bertanggung jawab mengelola anggaran desa agar pemanfaatan sumber daya berjalan secara efektif dan tepat sasaran (Pamungkas & Dewi, 2024).

Pendamping desa memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat lokal dengan memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Upaya pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat, tetapi juga mendorong partisipasi yang inklusif dalam pengambilan keputusan, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mereka secara aktif mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengikuti berbagai program pelatihan, dan melaksanakan proyek-proyek yang dirancang bersama dengan pemerintah serta organisasi terkait (Pamungkas & Dewi, 2024).

Keunggulan yang dimiliki Desa Tajurhalang yaitu lingkungan alamnya yang masih asri dan subur. Terletak di wilayah perbukitan dengan udara yang sejuk, desa ini memberikan pemandangan alam yang indah dan suasana yang tenang. Kondisi geografis dan iklim ini membuat Tajurhalang sangat cocok untuk dijadikan destinasi agro eduwisata, di mana wisatawan dapat menikmati pengalaman dekat dengan alam, menjelajahi lahan pertanian, dan mengamati langsung kehidupan sehari-hari para warga.

Desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang dengan dukungan program pelatihan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Desa Wisata Tajurhalang mengalami kendala yang signifikan akibat tidak adanya legalitas resmi yang mengatur status dan pengelolaannya. Hal ini berdampak langsung pada terhentinya berbagai aktivitas pengembangan wisata di desa tersebut, termasuk pengelolaan potensi lokal yang sebelumnya menjadi daya tarik utama. Tanpa dasar hukum yang jelas, kelompok pengelola desa wisata tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, seperti mengelola sumber daya, menarik investor, atau merancang program berbasis masyarakat.

Selain itu, dapat menciptakan stagnasi dalam perkembangan desa wisata, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh Desa Tajurhalang, baik dalam aspek budaya, agraris, maupun pariwisata, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Situasi ini menegaskan pentingnya pengesahan legalitas sebagai landasan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan desa wisata dan mendorong kemajuan ekonomi serta sosial masyarakat setempat.

Mutu layanan atau pelayanan publik di Desa Tajurhalang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, serta fasilitas sanitasi. Beberapa program pemerintah seperti pembangunan jalan desa dan perbaikan fasilitas umum sedang berjalan, namun masih memerlukan waktu dan dukungan dari pemerintah daerah untuk mencapai kualitas layanan yang lebih baik. Di sisi lain, kehidupan bermasyarakat di desa ini sangat mendukung ikatan sosial yang kuat, di mana warga saling membantu dan aktif dalam kegiatan gotong royong dan

partisipasi sosial lainnya. Kendala-kendala ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun Desa Tajurhalang menjadi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Berdasarkan latar permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud melakukan pengembangan lebih lanjut dengan judul **“Kolaborasi Pemerintah Desa dan Kelompok Desa Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Tajurhalang Kabupaten Bogor”**.

1.2. Perumusan Masalah

Penentuan prioritas masalah dilakukan dengan mengumpulkan segenap informasi untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Selanjutnya dilaksanakan sesi *brainstorming* bersama mitra, yakni pengurus Desa dan Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) di Desa Tajurhalang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor untuk menggali permasalahan dan penawaran solusi, serta penyusunan rencana kerja. Hasil pendahuluan tersebut diperoleh analisa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata, pemasaran digital, dan pemanfaatan teknologi modern untuk mengoptimalkan potensi desa sebagai destinasi wisata.
2. Kurang kuatnya kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok desa wisata, dan masyarakat untuk mengembangkan program wisata yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

1.3.1. Tujuan kegiatan

Tujuan kegiatan merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan kegiatan berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atas jawaban rumusan penelitian. Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan kegiatan di atas. Penulis dapat menetapkan tujuan kegiatan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Desa Wisata tentang pengelolaan wisata pemasaran digital, dan pemanfaatan teknologi modern untuk mengoptimalkan potensi desa sebagai destinasi wisata.
2. Mendeskripsikan Kolaborasi antar pemerintah desa desa Tajurhalang, Kelompok Desa Wisata dan Masyarakat Desa Tajurhalang dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

1.3.2. Manfaat kegiatan

1. Bagi Masyarakat Desa Tajurhalang:
 - a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan wisata yang berkelanjutan.
 - b. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal sebagai sumber ekonomi alternatif.
 - c. Menumbuhkan peluang usaha baru berbasis wisata dan ekonomi kreatif.
 - d. Memperoleh dokumen rencana kerja dan media promosi yang dapat dimanfaatkan secara jangka panjang.
2. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Memiliki mitra pendamping (mahasiswa) dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan wisata.
 - b. Mendapatkan data, dokumentasi, dan rekomendasi berbasis lapangan untuk mendukung perencanaan desa di bidang pariwisata.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam problem solving, komunikasi masyarakat, dan manajemen kegiatan berbasis masyarakat.
 - b. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk kepentingan pengembangan desa.
 - c. Memperluas pengalaman praktis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis potensi lokal.
4. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - b. Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Pembangunan Desa Tajurhalang diarahkan untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Desa Tajurhalang, yang terletak di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, memiliki lokasi strategis dengan kekayaan alam, budaya, dan potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan dirancang untuk mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya lokal, dan pelibatan aktif kelompok desa wisata sebagai sarana kolaborasi dengan pemerintah desa. Adapun kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

1. Pemetaan Potensi Wisata

- a. Identifikasi dan inventarisasi objek wisata alam, budaya, serta potensi lokal lainnya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.
- b. Analisis keunggulan dan tantangan dari masing-masing potensi wisata.

2. Pendampingan Kelompok Pengelola Wisata (Pokdarwis)

- a. Penguatan struktur organisasi Pokdarwis dan pembagian peran anggota.
- b. Penyusunan rencana kerja dan program pengelolaan destinasi wisata jangka pendek dan panjang.
- c. Pembekalan dan pelatihan pengelolaan wisata, termasuk dalam hal pelayanan wisatawan, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia.

3. Peningkatan Kapasitas Promosi Wisata

- a. Pengembangan strategi promosi melalui media sosial dan pembuatan materi promosi seperti brosur, video, dan foto yang menggambarkan keunggulan wisata desa.
- b. Pelatihan digital marketing untuk kelompok pengelola wisata dan masyarakat.

4. Penyusunan Rencana Pengembangan Wisata Berkelanjutan

- a. Penyusunan roadmap dan program kerja yang mencakup aspek keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
- b. Perencanaan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti jalur wisata, fasilitas umum, dan aksesibilitas.

5. Pelibatan Masyarakat dalam Aktivitas Wisata

- a. Penguatan partisipasi masyarakat desa dalam ekonomi kreatif yang mendukung sektor wisata, seperti pembuatan kerajinan lokal, penyediaan kuliner khas, homestay, dan jasa pemandu wisata.
- b. Penyuluhan mengenai manfaat wisata berbasis masyarakat bagi ekonomi lokal dan lingkungan.

1.5. Rencana Aksi dan Solusi

Desa Tajurhalang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi desa mandiri yang berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Namun, beberapa kendala masih menjadi hambatan dalam pembangunan, seperti akses infrastruktur yang terbatas, pengelolaan lingkungan yang belum maksimal, serta kurangnya promosi potensi wisata dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan rencana aksi yang terarah dan solutif untuk menjawab tantangan tersebut.

Rencana aksi ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi pembangunan Desa Tajurhalang. Setiap kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan ekonomi lokal, dan pengembangan wisata berbasis edukasi serta budaya. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa, rencana ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang nyata, berkelanjutan, dan inklusif.

Berikut adalah rencana aksi dan solusi yang menjadi panduan dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik.

1. Pemetaan Potensi Wisata

- **Rencana Aksi:**

- a. Melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi wisata potensial di Desa Tajurhalang.
- b. Mewawancarai masyarakat dan pengelola wisata untuk mengidentifikasi daya tarik utama dan potensi pengembangan lebih lanjut.

- **Solusi:**

- a. Pemetaan ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam hal infrastruktur dan daya tarik wisata, sehingga pengelola dapat membuat keputusan yang tepat untuk prioritas pengembangan.
- b. Solusi jangka panjang: Menyusun dokumen rencana pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

2. Penguatan Kelompok Pengelola Wisata (Pokdarwis)

- **Rencana Aksi:**

- a. Melakukan pelatihan kepada anggota Pokdarwis tentang pengelolaan destinasi wisata, termasuk pelayanan kepada wisatawan, tata kelola, dan manajemen operasional.
- b. Menyusun struktur organisasi Pokdarwis yang jelas dengan pembagian tugas yang spesifik.
- c. Membantu Pokdarwis dalam menyusun program kerja tahunan serta SOP untuk pengelolaan destinasi wisata.

- **Solusi:**

- a. Membangun sistem pengelolaan yang lebih profesional dan terorganisir, sehingga Pokdarwis dapat mengelola destinasi wisata dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengunjung.
- b. Solusi jangka panjang: Membangun kapasitas kelompok agar dapat mandiri dalam mengelola destinasi wisata.

3. Peningkatan Kapasitas Promosi Wisata

- **Rencana Aksi:**

- a. Melakukan pelatihan kepada Pokdarwis dan masyarakat setempat mengenai cara menggunakan media sosial untuk mempromosikan wisata, termasuk pembuatan konten visual yang menarik (foto, video).
- b. Membantu dalam pembuatan materi promosi, seperti brosur dan video dokumenter yang menggambarkan keindahan wisata di Desa Tajurhalang.
- c. Meningkatkan kolaborasi dengan platform wisata online untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

- **Solusi:**
 - a. Dengan promosi yang efektif, jumlah wisatawan yang datang akan meningkat, sehingga mendukung pendapatan lokal dan memperkenalkan Desa Tajurhalang ke audiens yang lebih besar.
 - b. Solusi jangka panjang: Memastikan promosi dapat berkelanjutan melalui pengelolaan konten secara mandiri oleh Pokdarwis dan masyarakat setempat.

4. Penyusunan Rencana Pengembangan Wisata Berkelanjutan

- **Rencana Aksi:**
 - a. Mengajak masyarakat dan Pokdarwis untuk berdiskusi tentang pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan wisata, melibatkan mereka dalam penyusunan rencana pengembangan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 - b. Menyusun roadmap pengembangan wisata untuk lima tahun ke depan, termasuk infrastruktur yang diperlukan, kegiatan yang akan dilakukan, dan sumber daya yang dibutuhkan.
- **Solusi:**
 - a. Penyusunan rencana pengembangan ini akan membantu memastikan destinasi wisata berkembang secara terencana, tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk jangka panjang.
 - b. Solusi jangka panjang: Rencana pengembangan yang mencakup prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta adanya sistem evaluasi berkala terhadap kemajuan pengembangan destinasi.

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Ekonomi Kreatif

- **Rencana Aksi:**
 - a. Melakukan pelatihan dan workshop kepada masyarakat desa mengenai peluang bisnis yang dapat dikembangkan di sektor wisata, seperti kuliner lokal, kerajinan tangan, homestay, dan jasa pemandu wisata.
 - b. Membantu dalam penyusunan program kewirausahaan berbasis wisata untuk masyarakat desa yang berminat untuk membuka usaha.
 - c. Mendorong kolaborasi antara masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah desa dalam menciptakan ekosistem yang saling mendukung.
- **Solusi:**
 - a. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi kreatif, Desa Tajurhalang akan memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
 - b. Solusi jangka panjang: Menumbuhkan kewirausahaan lokal yang berkelanjutan, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan mendukung ekosistem pariwisata desa.

1.6. Target Luaran Kegiatan dan Indikator Capaian Luaran

Setiap kegiatan dalam program pembangunan desa dirancang untuk menghasilkan luaran yang jelas, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Luaran tersebut tidak hanya berupa publikasi. Dengan indikator capaian yang spesifik, keberhasilan program dapat dievaluasi secara efektif untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai. Tabel berikut menjelaskan target luaran yang ingin dicapai beserta indikator capaian untuk masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

1.6.1. Target Luaran

1. Dokumen Pemetaan Potensi Wisata Desa Tajurhalang

- a. Terbuatnya dokumen yang memetakan semua objek wisata potensial di Desa Tajurhalang, mencakup analisis keunggulan, tantangan, dan rekomendasi pengembangan destinasi wisata.

2. Penguatan Struktur Organisasi Pokdarwis

- a. Terbentuknya struktur organisasi Pokdarwis yang lebih terorganisir dan jelas, dengan pembagian tugas yang spesifik di setiap anggota Pokdarwis.
- b. Tersusunnya program kerja tahunan dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pengelolaan destinasi wisata.

3. Peningkatan Promosi Wisata Desa

- a. Tersusunnya materi promosi berupa brosur, video, dan foto destinasi wisata yang siap untuk disebarluaskan di media sosial dan platform promosi wisata online.
- b. Terselenggaranya pelatihan digital marketing bagi Pokdarwis dan masyarakat desa.

4. Rencana Pengembangan Wisata Berkelanjutan

- a. Terbentuknya rencana pengembangan wisata yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan diterapkan dalam jangka panjang.
- b. Tersusunnya roadmap pengembangan destinasi wisata yang mencakup infrastruktur, kegiatan, dan sumber daya yang dibutuhkan.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ekonomi Kreatif

- a. Terselenggaranya pelatihan dan workshop kewirausahaan berbasis wisata untuk masyarakat desa.
- b. Meningkatnya jumlah usaha ekonomi kreatif yang berbasis wisata, seperti kuliner local dan kerajinan.

1.6.2. Indikator Capaian Luaran

1. Dokumen Pemetaan Potensi Wisata Desa Tajurhalang

- a. **Indikator:** Tersusunnya dokumen pemetaan potensi wisata dengan data yang lengkap mengenai objek wisata, tantangan, dan peluang pengembangan.
Capaian: Pemetaan selesai dan didokumentasikan dalam bentuk laporan yang dapat digunakan untuk perencanaan lebih lanjut.

2. Penguatan Struktur Organisasi Pokdarwis

- a. **Indikator:** Tersusun struktur organisasi Pokdarwis yang jelas

Capaian: Struktur organisasi yang berfungsi, dengan pembagian tugas yang terperinci dan peran yang jelas bagi setiap anggota Pokdarwis. Selain itu, tersusunnya program kerja tahunan dan SOP yang diterima dan dijalankan oleh Pokdarwis.

3. Peningkatan Promosi Wisata Desa

- a. **Indikator:** Materi promosi (brosur, video, foto) selesai dan dibagikan melalui media sosial dan platform wisata online.

Capaian: Materi promosi siap digunakan dan telah dipublikasikan di beberapa platform digital dengan respon yang positif dari audiens.

4. Rencana Pengembangan Wisata Berkelanjutan

- a. **Indikator:** Penyusunan dokumen rencana pengembangan wisata yang melibatkan masyarakat desa dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Capaian: Rencana pengembangan wisata jangka panjang sudah disusun, melibatkan perencanaan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ekonomi Kreatif

- a. **Indikator:** Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan peningkatan jumlah usaha ekonomi kreatif berbasis wisata.

Capaian: Jumlah usaha ekonomi kreatif berbasis wisata meningkat, serta masyarakat menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam sektor wisata.